

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

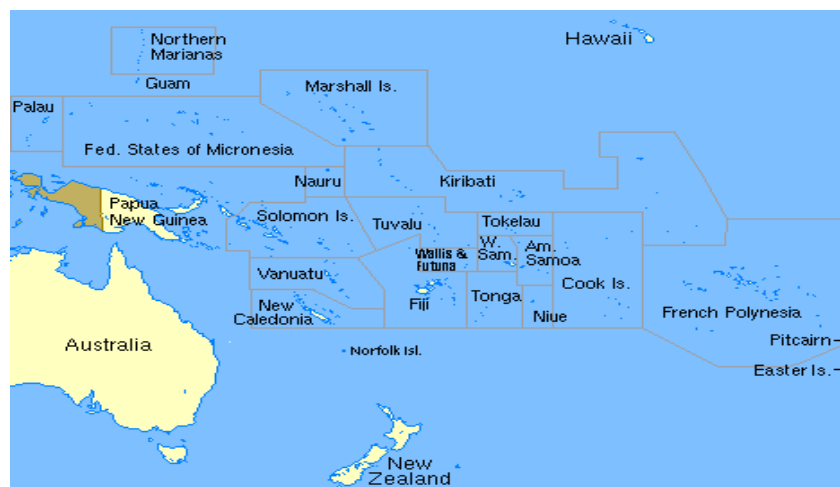
Perkembangan pariwisata kerap kali diasosiasikan dengan peningkatan jumlah produksi limbah di suatu wilayah. Limbah yang dihasilkan oleh turis sebanyak dua kali lipat dari warga lokal (Sustainable Travel International, 2020) Pada tahun 2001, diperkirakan sebanyak 4.8 miliar ton limbah diproduksi dalam kurun waktu satu tahun hanya dari sektor pariwisata saja (Jamieson, Kelovkar, Sunalai, & Mandke, 2003), dengan perhitungan hampir 2 kg per hari, khususnya di negara berkembang. Sebuah wilayah dapat menghasilkan sampah lebih banyak setiap waktunya dalam satu hingga beberapa periode. United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan sekitar 11.2 miliar ton limbah padat dihasilkan oleh masyarakat dunia setiap tahunnya (UNEP, 2012). Sementara itu, sebuah negara dapat memproduksi lebih dari 30 juta ton limbah setiap tahunnya, seperti pada contohnya adalah Kanada yang menghasilkan 36.1 juta ton limbah pada tahun 2019 (Statista, 2021). Hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya faktor tertentu yang dapat meningkatkan produksi limbah, seperti kelalaian pihak tertentu atau minimnya pengetahuan dalam pengolahan limbah padat.

Sampah atau yang lebih dikenal dengan istilah limbah, merupakan sisa-sisa hasil kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai atau tidak layak digunakan. Sementara limbah padat merupakan hasil pembuangan dari sisa kegiatan, baik menghasilkan ataupun menggunakan suatu produk. Sudah tidak ada nilai guna yang didapatkan dari benda atau zat tersebut, sehingga dicampakkan. Menurut *Environmental Protection Agency* (EPA), lembaga Amerika Serikat yang bergerak di bidang lingkungan, mendefinisikan limbah padat sebagai berikut:

*“Any garbage, refuse, sludge from a wastewater treatment plant, water supply treatment plant, or air pollution control facility, and other discarded material, including solid, liquid, semisolid, or contained*

*gaseous material, resulting from industrial, commercial, mining, and agricultural operations and from community activities.”*  
(Environmental Protection Agency, 2001)

Kepulauan Pasifik merupakan salah satu kawasan yang terletak di Samudra Pasifik, di antara Australia dan Selandia Baru. Kepulauan dengan luas kurang lebih sebesar 30 juta kilometer persegi yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, seperti Indonesia, Filipina, dan Jepang (Richards & Haynes, 2014). Kepulauan ini terdiri dari beberapa pulau, di mana pembagian pulaunya berdasarkan tiga kelompok etnis, yakni Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia (West & Foster, 2020). Kelompok etnis Melanesia yang terdiri atas Papua Nugini, Kepulauan Bismarck, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, serta Fiji. Kemudian, etnis Mikronesia yang terdiri dari Palau, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Nauru, Kiribati, Kepulauan Marshall serta Kepulauan Wake. Dan yang terakhir adalah etnis Polinesia yang meliputi Tuvalu, Wallis dan Futuna, Tokelau, Samoa serta Samoa Amerika, Tonga, Niue, Kepulauan Cook dan Polinesia Prancis.



**Gambar 1: Samudera Pasifik (sumber: researchgate.net)**

Kepulauan Pasifik dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terkenal dan mendunia. Banyak pelancong mancanegara yang tertarik untuk mengunjungi Kepulauan Pasifik dikarenakan kondisi alam yang masih bagus (*pristine*), kebudayaan yang beragam, serta situs-situs sisa perang dunia kedua yang masih belum banyak terjamah oleh manusia, seperti Pantai Merah di

Kiribati, Guadalcanal di Kepulauan Solomon, dan Luganville di Vanuatu (Pacific Island Living, 2020). Mengingat betapa pentingnya pariwisata sebagai sumber devisa negara di wilayah ini, pemerintah setempat pun sangat mendukung perkembangan sektor pariwisatanya. Sebagai contohnya adalah Polinesia Prancis, sebuah negara kepulauan kecil dengan luas wilayah 4,167 kilometer persegi, yang mengandalkan sektor pariwisatanya untuk menyumbangkan 3.9% dari total devisa negara. Contoh lainnya adalah Fiji, di mana sektor pariwisatanya menyumbang sebesar 3.3% dari total devisa (Pacific Tourism Organisation, 2020). Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangatlah penting bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik.

Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan dalam paragraf pembuka, pariwisata pun memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap produksi limbah dari suatu wilayah, tanpa terkecuali negara di kawasan Kepulauan Pasifik. Seperti pada contohnya di salah satu wilayah Kepulauan Pasifik, yakni Kepulauan Cook, dimana pada tahun 2009 sektor pariwisata telah menyumbang sebesar 15.25% dari total limbah di Rarotonga, salah satu negara di Kepulauan Cook (Te Ipukarea Society Inc, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam melakukan pengelolaan limbah yang ada di wilayah Kepulauan Pasifik, sehingga limbah masih menjadi salah satu permasalahan krusial yang dihadapi wilayah tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara kawasan Kepulauan Pasifik ialah belum maksimalnya penanganan dalam pengolahan limbah padat. Sejumlah studi dan pendekatan telah dilakukan untuk menangani permasalahan pengelolaan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik, namun tidak semuanya berhasil. Tidak sedikit studi dan pendekatan yang melenceng dari permasalahan utama ketika dibawa ke forum diskusi, sehingga target dari studi dan pendekatan tersebut tidak tercapai. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pengelolaan limbah padat belum ditangani secara optimal, seperti minimnya pengetahuan akan pentingnya pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh penduduk sekitar, sehingga menyebabkan buruknya pengolahan limbah padat di kawasan tersebut yang kemudian berdampak terhadap sektor

lainnya, seperti kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, sumber mata air, perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, serta sektor lainnya yang menjadi bagian dari pembangunan nasional (Richards & Haynes, 2014). Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pendapat dalam manajemen struktural dalam pengelolaan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik. Sebagian besar negara di Kepulauan Pasifik mengatur permasalahan pengelolaan limbah padat oleh pemerintah pusat, namun dalam kasus Kepulauan Marshall dan Kiribati yang diatur dalam satu badan struktur, sehingga terjadinya selisih paham yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan.

Beberapa faktor tambahan pun turut menjadi sumbangsih dalam pengelolaan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik, seperti keterbatasan sumber daya serta lahan terbuka untuk dijadikan tempat pembuangan serta pemrosesan akhir; teknologi yang memadai serta faktor finansial yang menjadi faktor krusial dalam permasalahan tersebut. Akibatnya, minimnya penanganan dalam hal tersebut berdampak kepada sektor pembangunan yang lain, seperti pariwisata, kesehatan masyarakat, perdagangan, kualitas lingkungan baik dari pertanian, perairan hingga perikanan, serta keamanan pangan. Hal tersebut tentunya merupakan hal yang fatal apabila tidak ditindaklanjuti secara tangkas dan serius, dan akan memberikan permasalahan jangka panjang.

Limbah padat masih menjadi salah satu pokok permasalahan lingkungan di dunia, khususnya di wilayah Kepulauan Pasifik. Masih banyak negara maupun wilayah yang belum mampu menangani permasalahan limbah secara tuntas. Baik negara maju maupun berkembang masih menghadapi permasalahan tersebut. Akan tetapi, negara maju memiliki tendensi untuk menghasilkan limbah lebih banyak dibandingkan negara berkembang, karena negara berkembang cenderung lebih buruk dalam menangani permasalahan limbah padat daripada negara maju (UNESCAP, 2017). Sudah banyak negara maju yang telah mengimplementasi sistem pengelolaan limbah khususnya limbah padat, seperti contoh adalah Jepang. Sejak tahun 1900, tepatnya pada era Restorasi Meiji, Jepang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pengelolaan limbah. Tepatnya melalui kebijakan *The Waste Cleaning Act* yang diberlakukan

pada tahun 1900, dimana pemerintah Jepang mewajibkan kota-kota besar untuk mengumpulkan dan mengolah limbah yang selanjutnya dikelola oleh petugas khusus, yang diawasi langsung oleh pemerintah Jepang (Minister of the Environment, 2014). Pada saat itu, sampah dibuang sembarangan di jalanan atau lahan kosong dan dibiarkan menumpuk selama beberapa waktu, sehingga menyebabkan tempat tersebut menjadi sumber hama seperti lalat, tikus, dan nyamuk yang membawa bakteri dan kuman yang dapat menimbulkan penyakit, hal tersebut membuat pemerintah Jepang mulai memperhatikan kesehatan masyarakat Jepang.

Jepang memiliki istilah *mottainai* yang berarti ‘sayang sekali’ atau ‘boros’ jika diterjemahkan secara harfiah. Jika dikaitkan dengan pengelolaan limbah, maka dapat diartikan menjadi sebuah usaha atau praktik dalam menjaga dan menggunakan suatu barang secara maksimal dan optimal selama mungkin. Perkembangan zaman menyebabkan permasalahan limbah yang dihadapi oleh Jepang menjadi semakin kompleks. Pada tahun 1970, pemerintah Jepang memperkenalkan sistem pengelolaan limbah kepada masyarakat Jepang yang bernama *Waste Management Act* (Minister of the Environment, 2014). Sistem tersebut diterima baik oleh masyarakat Jepang dan menjadi salah satu negara dengan sistem pengelolaan limbah yang direncanakan dengan baik serta terorganisir dengan rapi (Niyati, 2015). Jenis limbah yang dihasilkan oleh Jepang bermacam-macam, sehingga sistem ini pun juga memberikan solusi penanganan untuk hampir semua jenis limbah, seperti limbah perkotaan (*municipal waste*), limbah industri (*industrial waste*), limbah medis (*medical waste*), limbah peralatan rumah tangga (*home appliances*), botol PET, biomassa, hingga pengelolaan dari tempat pembuangan limbah itu sendiri (Minister of the Environment, 2012).

Hadirnya organisasi dan lembaga internasional diharapkan dapat membantu perkembangan dunia internasional. Banyak organisasi dan lembaga internasional yang dibentuk dan khusus didedikasikan untuk membantu negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang agar dapat meningkatkan pengembangan dan pembangunan dari negara tersebut melalui bantuan baik

secara finansial maupun bantuan langsung seperti pelatihan dan bantuan fisik lainnya. Salah satu lembaga internasional yang kerap membantu perkembangan dunia internasional adalah Japanese International Cooperation Agency.

Japanese International Cooperation Agency atau yang lebih dikenal dengan sebutan JICA, merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang pembangunan. JICA yang sebelumnya merupakan bagian dari layanan pemerintah Jepang, kini menjadi lembaga independen pada tahun 2003. JICA merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Jepang dalam membantu perkembangan dunia internasional dengan melakukan kerjasama dengan negara asing, khususnya negara berkembang untuk membantu agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembangunan negara tersebut. Sejak tahun 1954, JICA telah membantu sebanyak 150 negara berkembang melalui programnya yang bernama *Official Development Assistance* atau ODA (JICA, 2009).

Sebagai negara yang telah berhasil membangun kembali perekonomiannya sejak kekalahannya dalam Perang Dunia ke 2 pada tahun 1945, Jepang melihat bahwa masih banyak negara di dunia yang membutuhkan bantuan, terutama pasca Perang Dingin. Banyak negara dan wilayah bekas peperangan yang memerlukan dukungan dalam membangun kembali negaranya. Masih banyak negara dan wilayah yang berjuang dalam memerangi kelaparan, kemiskinan, stagnansi ekonomi, hingga utang luar negeri yang kian meningkat. Terdapat juga konflik, baik secara regional maupun internal, yang pada saat itu masih banyak dihadapi oleh banyak negara di dunia, seperti Kamboja, Mozambik, Amerika Tengah, Amerika Selatan, hingga Palestina. Jepang yang melihat berbagai permasalahan tersebut tergerak dan terdorong untuk mengatasinya dengan ODA yang telah mereka masukkan ke dalam agenda kebijakan luar negerinya.

Jepang hadir sebagai salah satu negara industri terbesar di dunia, melihat potensi yang besar dari negara-negara yang membutuhkan bantuan tersebut, sehingga mendorong negara tersebut untuk memasukkan bantuan luar negeri sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negerinya. *Official Development Assistance* pertama kali diselenggarakan pada tahun 1958 dengan Burma (yang

sekarang disebut Myanmar) sebagai negara yang pertama kali menandatangani perjanjian damai dan kesepakatan mengenai perbaikan serta kerjasama ekonomi. Semakin berkembangnya perekonomian serta status internasional di mata dunia, Jepang semakin ‘bersemangat’ untuk membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan asing untuk meningkatkan infrastruktur negaranya. Isu-isu yang ditangani pun semakin berkembang seperti isu populasi, perekonomian, infrastruktur, lingkungan, budaya, hingga isu gender. Keberagaman isu tersebut menjadikan munculnya banyak permasalahan baru yang harus ditangani agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan.

Jepang pertama kali membuka dan membentuk hubungan diplomatik dengan negara Kepulauan Pasifik pada tahun 1968 yakni dengan Nauru (Minister of Foreign Affairs of Japan, 2020). Kemudian dilanjutkan dengan membentuk hubungan diplomatik dengan negara Kepulauan Pasifik lainnya hingga saat ini, yang terbaru adalah pembentukan hubungan diplomatik dengan Niue pada tahun 2015 (The Japan Times, 2015). Salah satu isu yang menjadi prioritas JICA adalah peningkatan mutu lingkungan agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jepang melalui JICA telah membantu banyak negara asing khususnya negara berkembang dalam peningkatan mutu lingkungan hidup. Kepulauan Pasifik menjadi salah satu negara penerima bantuan dari Jepang dalam bidang lingkungan.

Permasalahan lingkungan masih menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi kawasan Kepulauan Pasifik, salah satunya yakni pengelolaan limbah padat. Pengelolaan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik masih tergolong minim, terdapat beberapa faktor yang membuat pengelolaan limbah padat di wilayah tersebut belum optimal. Semakin hari, jumlah produksi limbah semakin meningkat namun belum ditangani secara tuntas oleh otoritas setempat, maupun regional. Letak geografis kawasan Kepulauan Pasifik dianggap cukup terisolir dari wilayah lainnya, serta terbatasnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, seperti keterbatasan finansial. Negara di kawasan Kepulauan Pasifik masih bergantung kepada bantuan luar negeri dari negara-

negara asing, sehingga membatasi ruang gerak mereka untuk membangun dan mengembangkan negara dan wilayahnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadikan faktor pendorong untuk melakukan kerjasama dalam memperbaiki kualitas pengelolaan limbah padat.

Setelah menyadari dan memahami hal tersebut, maka kawasan Kepulauan Pasifik melalui organisasi inter-governmental dalam bidang lingkungan Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang melalui lembaga internasional JICA dalam menangani permasalahan pengelolaan limbah padat. Belum optimalnya penanganan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik tentu membuat negara lain tergerak untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Penulis melihat dan menyadari bahwa kawasan Kepulauan Pasifik masih minim akan data dan studi yang membahas kawasan tersebut, sehingga mendorong penulis untuk meneliti dan mencari tahu apakah kerjasama yang dilakukan antara JICA dengan SPREP membuahkan hasil yang baik, atau malah sebaliknya. Pertemuan demi pertemuan telah dilakukan dalam mencapai tujuan optimalisasi pengelolaan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik, seperti contohnya Japan-Pacific Leaders' Meeting atau PALM.

Dalam mewujudkan komitmen Jepang di PALM ke-2 pada tahun 2000, Jepang menginisiasi kerjasama kepada negara di kawasan Kepulauan Pasifik dalam menangani pengelolaan limbah padat di kawasan tersebut melalui JICA yang bekerja sama dengan SPREP dalam bentuk bantuan luar negeri. Kemitraan antara dua organisasi tersebut sudah dilaksanakan sebelumnya melalui program “*Solid Waste Management Project in Oceania Region*” di Samoa pada tahun 2006 hingga 2010, yang kemudian berkembang menjadi serangkaian kerjasama lingkungan lainnya di kawasan Kepulauan Pasifik yang dimulai dari pengiriman tenaga ahli JICA ke SPREP pada tahun 2000, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan regional dalam pengolahan limbah padat di Okinawa dan Samoa dari tahun 2001 hingga 2007; rehabilitasi tempat pembuangan limbah di Samoa; penyusunan strategi regional dalam pengolahan limbah padat; dan kerjasama bilateral di beberapa negara Kepulauan Pasifik seperti Palau (2005–



2008), Vanuatu (2006–2008), dan Fiji (2008–2011). Serangkaian kegiatan tersebut sedikit banyak telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan pengolahan limbah padat khususnya di negara dengan tingkat pariwisata yang tinggi seperti negara kawasan Kepulauan Pasifik.

Dikarenakan keberhasilan serangkaian kerjasama yang dilakukan JICA dan SPREP sebelumnya, maka diciptakannya rencana atau strategi dalam pengelolaan limbah padat yang dikenal dengan nama *Pacific Regional Solid Waste Management Strategy* yang diimplementasikan pada tahun 2010 hingga 2015, yang kemudian menjadi pedoman dalam pertemuan SPREP selanjutnya. Tidak hanya itu, dikarenakan meningkatnya permintaan negara di Kawasan Pasifik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan, khususnya PLP, JICA memberikan bantuan kepada negara Kepulauan Pasifik yakni program *Japanese Technical Cooperation for Promotion of Regional Initiative on Solid Waste Management in Pacific Island Countries* (J-PRISM). J-PRISM berlangsung selama lima tahun yang dimulai pada tahun 2011 hingga 2016. Tujuan kerjasama ini dibentuk ialah dalam membangun atau meningkatkan kapasitas negara-negara terkait dalam Strategi Pengelolaan Limbah Regional pada tahun 2010 hingga 2015. Sebanyak sebelas (11) negara Kepulauan Pasifik terlibat dalam program ini, diantaranya adalah Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu, serta negara penerima bantuan yakni Kepulauan Cook, Nauru, dan Niue.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan limbah padat di negara Kepulauan Pasifik masih menjadi satu permasalahan pokok yang dimasukkan ke dalam agenda dalam pembangunan negara. Banyak negara di kawasan tersebut, termasuk wilayah di dalamnya, masih awam dengan istilah pengelolaan limbah padat. Sehingga, mendorong para pemimpin negara di Kepulauan Pasifik untuk melakukan berbagai cara agar dapat meningkatkan kesadaran atas pentingnya hal tersebut.

Kepulauan Pasifik, melalui SPREP, mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan JICA. Melalui serangkaian kerjasama serta perumusan perencanaan dan strategi, SPREP dan JICA telah menginisiasi kerjasama J-PRISM.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan singkat yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dari penelitian ini adalah: **Bagaimana kerjasama Jepang dengan Negara Kawasan Kepulauan Pasifik dalam Menangani Pengelolaan Limbah Padat di Kepulauan Pasifik Periode 2011-2016?**

Pertanyaan tersebut didasari oleh kepentingan penulis untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana peran Jepang, khususnya melalui organisasi internasional JICA dalam membantu negara berkembang untuk mengembangkan negaranya, dalam penulisan ini khususnya di negara kawasan Kepulauan Pasifik melalui SPREP dalam program *Japanese Technical Cooperation for Promotion of Regional Initiative on Solid Waste Management in Pacific Island Countries* atau J-PRISM yang berlangsung pada periode 2011 hingga 2016.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan dinamika permasalahan pengelolaan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik menjadi salah satu permasalahan yang krusial.
2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana kerjasama J-PRISM dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan limbah padat di kawasan Kepulauan Pasifik.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara mendalam mengenai isu pengelolaan limbah padat khususnya di wilayah Kepulauan Pasifik, serta memberikan wawasan mengenai peran dari JICA dalam membantu wilayah tersebut mengatasi permasalahan pengelolaan limbah padat yang sedang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan pada penelitian di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik serupa.

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan informasi terhadap *stakeholders* atau para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan isu pengelolaan limbah padat, khususnya di kawasan Kepulauan Pasifik maupun para *stakeholders* yang sedang menghadapi permasalahan serupa di wilayah lainnya.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penyusunannya, penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, yakni dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai pendahuluan dari penelitian, yang terdiri dari lima bagian yakni; latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka, di mana penulis akan membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang nantinya akan dijadikan acuan dan juga

pembeda dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian juga akan membahas kerangka pemikiran yang terdiri dari teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan alur pemikiran dan asumsi dasar atau hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai metode atau teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta lokasi dan waktu penelitian.

### **BAB IV DINAMIKA PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DI NEGARA KEPULAUAN PASIFIK**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai mengenai dinamika pengelolaan limbah padat yang terjadi di Negara Kepulauan Pasifik. Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan beberapa isu dan objek permasalahan dari pengelolaan limbah padat di wilayah tersebut.

### **BAB V ANALISIS RANGKAIAN KERJASAMA J-PRISM**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kerjasama yang dilakukan antara SPREP dan JICA serta bagaimana Jepang membantu Negara Kepulauan Pasifik dalam menangani pengelolaan limbah padat yang ada di Kepulauan Pasifik.

### **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian secara menyeluruh, serta memberikan saran dan rekomendasi yang relevan terkait permasalahan yang telah diteliti dan dianalisis.